



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	12
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# Saksi Dana Hibah Diminta Kooperatif



BEBERKAN KASUS: Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi memaparkan sederet kasus yang sedang ditangani tahun 2018.

## Kasus Dugaan Penyelewengan Bantuan Rp 250 Juta ke KNPI

**Bukittinggi, Padak**—Kasus dugaan penyelewengan dana hibah senilai Rp 250 juta yang menyeret pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi periode 2010-2013, telah memasuki tahapan penyidikan umum. Untuk mengungkap kasus ini, Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah memeriksa sebanyak 17 orang saksi.

Tiga bulan lalu ada laporan dari masyarakat. Maka, kami buat tim khusus. Penyelidikan telah selesai. Kini sudah masuk tahapan penyidikan. Semoga dalam waktu dekat dapat ditetapkan tersangkanya," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Zuhadi Savitri Noor saat memimpin *press gathering* di kantornya, Selasa (30/10).

Zuhadi didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidus) Edi Rohendi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Efendri Eka Saputra dan Kasi Intel Alexander Zaldi menjelaskan, nilai kerugian sementara ditaksir mencapai Rp 200 juta.

Diketahui, KNPI Bukittinggi menerima dana hibah sebesar Rp 250 juta dari Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2012. Adapun susunan pengurus KNPI Bukittinggi periode 2010-2013 seperti yang disebutkan pihak kejaksaan, diketuai oleh David Kassidi dengan Sekretaris Adlan Sanur dan Bendahara Dewi Afrodita.

Dugaan pelanggaran hukum yang dimintakan keterangan kepada para saksi, sebut Zuhadi, yaitu apakah ada kegiatan KNPI yang memang dilakukan atau tidak. Lalu, apakah dana yang dipakai memang sesuai pemanfaatan sebenarnya atau tidak.

"Dari hasil pemeriksaan



Tiga bulan lalu ada laporan dari masyarakat. Maka, kami buat tim khusus. Penyelidikan telah selesai. Kini sudah masuk tahapan penyidikan. Semoga dalam waktu dekat dapat ditetapkan tersangkanya.

### Zuhadi Savitri Noor

beberapa saksi, sampai hari ini (kemarin, red) belum ada laporan pertanggungjawaban yang diserahkan ke Pemko Bukittinggi. Itu juga salah satu sebab pemko tidak pernah lagi memberikan dana hibah sejak tahun 2013," terangnya.

Pengungkapan kasus yang terkesan memakan waktu tersebut, diakui Zuhadi, lantaran beberapa saksi yang dipanggil tidak datang dan beberapa kali dilakukan pemanggilan ulang.

"Yang jelas, koridor penanganan kasusnya masih sesuai SOP dan tidak melenceng dari batasan waktu penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, kami minta agar seluruh saksi dapat kooperatif," tegasnya.

Kejaksaan Negeri Bukittinggi juga menyebut pihaknya telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). "Sudah dijadwalkan, tinggal menunggu jadwal pelaksanaan," puangkannya. (r)